



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

**INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa setiap Entitas Pelaporan diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Untuk itu Inspektorat Kabupaten Tegal menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan SKPD yang disusun antara lain berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca ataupun manajemen entitas akuntansi.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, manajemen, dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan SKPD selama satu periode anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2022.

Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
- e. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- f. Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Inspektorat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional;
- 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah;
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD;

- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan SKPD;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada SKPD;
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan LRA
 - 5.1.2 Belanja LRA
- 5.2 Laporan Operasional (LO)
 - 5.2.1 Pendapatan – LO
 - 5.2.2 Beban – LO
 - 5.2.3 Kegiatan Non Operasional – LO
 - 5.2.4 Pos Luar Biasa
- 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Perubahan Ekuitas.
- 5.4 Neraca
 - 5.4.1. Aset
 - 5.4.2. Kewajiban
 - 5.4.3. Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD SKPD

2.1 EKONOMI MAKRO/ EKONOMI REGIONAL

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada hakekatnya adalah merupakan pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing – masing dalam asas Desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat otonomi yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi:

1. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
2. Entitas pelaporan keuangan;
3. Dasar hukum pelaporan keuangan;
4. Asumsi dasar;
5. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
6. Kendala informasi yang relevan dan handal;
7. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. Jenis laporan keuangan;
9. Definisi unsur laporan keuangan;

10. Pengakuan unsur laporan keuangan; dan
11. Pengukuran unsur laporan keuangan.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Target kinerja APBD 2022 pada Inspektorat Kabupaten Tegal adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Input	:	Rp 14.058.000,00
Output	:	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target	:	100 %
Realisasi	:	- Fisik 100 %
		- Keuangan Rp 6.730.000,00 (47,87%)

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Input	:	Rp 15.075.000,00
Output	:	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD
Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target	:	100 %
Realisasi	:	- Fisik 100 %
		- Keuangan Rp 11.913.711,00 (79,03%)

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Input	:	Rp 4.206.357.000,00
Output	:	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan
Outcome	:	Peningkatan Kinerja Aparatur
Target	:	100 %
Realisasi	:	- Fisik 100 %
		- Keuangan Rp 4.028.203.586,00 (95,76%)

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Input : Rp60.000.000,00
Output : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp60.000.000,00 (100%)

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Input : Rp 600.000.000,00
Output : Jumlah APIP yang mengikuti Diklat
Outcome : Peningkatan kinerja aparatur
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 501.644.635,00 (83,61%)

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input : Rp 30.000.000,00
Output : Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 30.000.000,00 (100%)

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : Rp 117.400.000,00
Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja

Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 115.644.000,00 (98,47%)

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Input : Rp 60.000.000,00
Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 57.535.500,00 (95,89%)

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Input : Rp 110.000.000,00
Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 102.279.500,00 (92,98%)

5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Input : Rp 41.510.000,00
Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 34.205.000,00 (82,40%)

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Input : Rp 10.000.000,00
Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur
Target : 100 %

Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp9.948.000,00 (99,48%)

7) Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Input : Rp 334.960.000,00
Output : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 203.807.390,00 (60,85%)

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Input : Rp278.804.000,00
Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 247.562.999,00 (89,76%)

2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Input : Rp 1.967.965.000,00
Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 1.967.965.000,00 (100%)

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input : Rp 25.000.000,00
Output : Jumlah surat terkirim
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 4.800.500,00 (19,20%)

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input : Rp 162.000.000,00
Output : Jumlah rekening air, listrik telpon dan internet.
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 131.676.783,00 (81,28%)

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Input : Rp 20.310.000,00
Output : Jumlah terbayarnya tagihan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk THL .
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja.
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 4.212.673,00 (20,74%)

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Input : Rp 447.000.000,00

Output : Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur

Target : 100 %

Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 242.913.233,00 (54,34%)

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Input : Rp 100.000.000,00

Output : Tersedianya jasa pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja

Target : 100 %

Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 79.189.750,00 (79,19%)

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Input : Rp 309.650.000,00

Output : Tersedianya jasa pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja

Target : 100 %

Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 302.531.500,00 (97,70%)

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Input : Rp 47.00.000,00

Output : Jumlah laporan pengawasan atas Kinerja Pemerintah Daerah

Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 34.813.010,00 (74,07%)

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Input : Rp 25.000.000,00
Output : Jumlah laporan pengawasan atas Keuangan Pemerintah Daerah
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 20.907.400,00 (83,63%)

3) Reviu Laporan Kinerja

Input : Rp 20.000.000,00
Output : Jumlah laporan Reviu pengawasan atas Keuangan Pemerintah Daerah
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 12.710.000,00 (63,55%)

4) Reviu Laporan Keuangan

Input : Rp 20.000.000,00
Output : Jumlah laporan Reviu pengawasan atas Keuangan Pemerintah Daerah
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 14.752.000,00 (73,76%)

5) Pengawasan Desa Perangkat Daerah

Input : Rp 402.000.000,00

Output : Jumlah laporan pengawasan atas desa
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 341.024.281,00 (84,83%)

6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Input : Rp50.000.000,00
Output : Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 35.746.700,00 (71,49%)

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

1) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Input : Rp 376.760.000,00
Output : Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 214.234.496,00 (56,86%)

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN & ASISTENSI

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Input : Rp 54.936.000,00

Output : Tersusunnya Kebijakan Pengawasan (JAKWAS) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 47.678.800,00 (86,79%)

2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Input : Rp 72.848.500,00
Output : Terlaksananya Rakorwas, Larwasda
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 54.740.300,00 (75,14%)

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Input : Rp 189.329.000,00
Output : Penerapan SPIP secara efektif
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 176.356.631,00 (93,15%)

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB

Input : Rp 52.067.000,00
Output : Meningkatnya indeks RB, terlaksananya monitoring LHKASN, jumlah rintisan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK/ WBBM.
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 36.871.100,00 (70,81%)

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Input : Rp 141.858.600,00
Output : Prosentase capaian MCP dan pelaporan gratifikasi.
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp124.289.278,00 (87,61%)

4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Input : Rp 30.330.000,00
Output : Tecapainya indeks SPI
Outcome : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Target : 100 %
Realisasi : - Fisik 100 %
- Keuangan Rp 12.970.290,00 (42,76%)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Tegal
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Tegal adalah sebesar 86,23% dengan perincian :

3.1.1 Pendapatan

Jumlah Dana DPAD-SKPD 2022 = Rp0

Dana yang terealisasi sebesar = Rp0

3.1.2 Belanja (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)

Jumlah Dana DPAP-SKPD 2022 = **Rp 10.398.258.100,00**

Dana yang terealisasi sebesar = **Rp 9.269.858.046,00**

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Secara umum pada tahun 2022 tidak terdapat permasalahan signifikan yang mempengaruhi target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja sebesar Rp9.269.858.046,00 dari plafon Rp 10.398.258.100,00 menunjukkan bahwa kinerja penyerapan belanja masih belum sesuai target. Secara prosentase terjadi kenaikan tingkat penyerapan sebesar 89,23% dibanding tahun sebelumnya terserap sebesar 86,23%.

Tidak tercapainya target kinerja belanja terutama disebabkan :

3.2.1 Adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan keterbatasan pelaksanaan pengawasan secara berkala terutama beberapa kegiatan mandatori yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, termasuk peningkatan SDM untuk pendidikan, pelatihan yang tidak dapat dilaksanakan.

3.2.2 Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan;

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- 3.2.1 Menambah jumlah SDM dan mengikutsertakan SDM dimaksud dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur khususnya terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah ;
- 3.2.2 Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara proaktif dan intensif;
- 3.2.3 Melakukan perencanaan pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang lebih detail dan akurat;
- 3.2.4 Mengikutsertakan JFT yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat kenaikan jenjang.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Dasar hukum pelaksanaan kebijakan akuntansi berpedoman pada :

- a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
- e Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten.

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Inspektorat Kabupaten Tegal.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang di gunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Artinya bahwa pendapatan diakui pada

saat kas di terima di rekening Kas Umum Daerah, dan belanja diakui pada saat kas di keluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, sedangkan selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran di sebut sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, sehingga tidak menggunakan istilah laba.

Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, artinya bahwa setiap kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang menjadi dasar untuk pengakuan dan pengukuran antara lain:

4.3.1 - Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

4.3.2 - Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan.

4.3.3 Piutang

Piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

4.3.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.3.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

4.3.6 Aset lainnya

Termasuk dalam Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

4.3.7 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setengah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau setelah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat

diukur dengan handal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

4.3.8 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1 Pendapatan-LRA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Tegal tidak mengelola pendapatan.

5.1.2 Belanja

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2022 yang dikelola Inspektorat Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

	Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
1	Belanja Pegawai	4.364.792.000,00	4.211.234.618,00	96,48	5.190.386.678,00
2	Belanja bunga	-	-	-	-
3	Belanja Hibah	-	-	-	-
4	Belanja Sosial	-	-	-	-
5	Belanja keuangan kepada prov/kab/kota&pmrth desa	-	-	-	-
6	Belanja tak terduga	-	-	-	-
7	Belanja Barang dan Jasa	1.780.997.500,00	1.202.815.401,00	67,54	891.756.958,00
8	Belanja Modal	311.995.500,00	154.577.500,00	49,54	193.450.000,00
	Jumlah	6.457.785.000,00	5.568.627.519,00	86,23	6.275.593.636,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp5.568.627.519,00 atau 86,23% dari anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.457.785.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp706.966.117,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp6.275.593.636,00.

5.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2022 sebesar Rp 4.150.291.586,00 atau 95,58% dari anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4.341.957.000,00. Realisasi TA 2022 berarti mengalami penurunan sebesar Rp 60.943.032,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp 4.211.234.618,00 yang terdiri dari:

Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	2	3	4=3/2	5
Belanja Gaji dan Tunjangan	4.206.357.000,00	4.028.203.586,00	95,76	4.096.094.618,00
Tambahan penghasilan PNS	-	-	-	-
Belanja penerimaan lainya,pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-
Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	135.600.000,00	122.088.000,00	90,04	115.140.000,00
Jumlah	4.341.957.000,00	4.150.291.586,00	95,59	4.211.234.618,00

5.1.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp 2.910.017.461,00 atau 76,28% dari anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.815.022.100,00. Realisasi TA 2022 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 1.707.202.060,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp 1.202.815.401,00.

5.1.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp 2.209.548.999,00 atau 98,98% dari anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.232.279.000,00. Realisasi TA 2022 berarti meningkat sebesar Rp 2.077.701.500,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp 154.577.500,00

	Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
a	Belanja Modal peralatan dan Mesin	2.232.279.000,00	2.209.548.999,00	98,98	161.995.500,00
b	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-	150.000.000,00
c	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
	Jumlah	2.232.279.000,00	2.209.548.999,00	98,98	311.995.500,00

5.2 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.2.1 PENDAPATAN-LO Rp0,00

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Tegal tidak mengelola pendapatan.

5.2.2 BEBAN-LO Rp 6.082.143.636,00

Jumlah tersebut realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, meliputi:

1. Beban Operasi Rp 7.561.999.362,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Operasi Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

a. Beban Pegawai Rp 4.150.291.586,00

Merupakan realisasi beban pegawai – LO Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

b. Beban Jasa Rp 920.236.168,00

Merupakan realisasi beban barang dan jasa – LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

c. Beban Persediaan Rp 867.295.687,00

Merupakan realisasi beban Persediaan – LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

d. Beban Pemeliharaan Rp 329.533.546,00

Merupakan realisasi beban Pemeliharaan – LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

e. Beban Perjalanan Dinas Rp 793.523.372,00

Merupakan realisasi beban Perjalanan Dinas – LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

f. Beban Penyusutan Dan Amortisasi Rp 501.119.003,00

Merupakan realisasi beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

5.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

5.3.1 Ekuitas Awal Rp 1.379.435.014,00

Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2022.

5.3.2 Surplus/Defisit-LO Rp 7.561.999.362,00

Merupakan saldo surplus atau defisit – LO per 31 Desember 2022.

Ekuitas berubah disebabkan antara lain :

- Adanya penambahan utang beban sebesar Rp 9.498.023,00
- Penyusutan atas asset tetap sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.069.989.974,00
- Penambahan pembelian aset melalui belanja modal tahun 2022 sebesar Rp 2.209.548.999,00 dan mutasi aset sebesar Rp145.500.000,00.

5.3.3 Ekuitas Akhir Rp 3.087.293.699,00

Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2022.

5.4 NERACA

5.4.1 Aset

a. Kas di Bendahara Pengeluaran per <u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Inspektorat Kabupaten Tegal yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di Bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

b. Persediaan per <u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp6.259.600,00	Rp6.493.700,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang di peroleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang di kelola oleh Inspektorat Kabupaten Tegal. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang di hitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp233.800,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021.

c. Investasi Non Permanen per <u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp0,00	Rp0,00

Tidak ada inventasi non permanen yang di kelola oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.

d. `Invetasi permanen per <u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp0,00	Rp0,00

Tidak ada inventasi permanen yang di kelola oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.

e. Aset Tetap per <u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp4.092.546.997,00	Rp6.160.595.996,00

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang di kelola oleh Inspektorat Kabupaten Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada di bawah koordinasi Desa. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, modal barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal , dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan

aset tetap. Berikut adalah saldo aset tetap yang di kelola oleh Inspektorat Kabupaten Tegal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2022:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Tanah	530.720.000,00	0,00	0	530.720.000,00
Peralatan dan Mesin	2.700.802.941,00	2.068.048.999,00	0,00	4.768.851.940,00
Gedung & Bangunan	765.294.006,00	0,00	0	765.294.006,00
Jalan, Jembatan, Irigasi & Jaringan	14.987.600,00	0,00	0	14.987.600,00
Aset Tetap Lainnya	33.062.450,00	0,00	0	33.062.450,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	47.680.000,00	0,00	0	47.680.000,00
Jumlah Aset Tetap	4.092.546.997,00	2.068.048.999,00	0,00	6.160.595.996,00

1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp530.720.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2021.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.768.851.940,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.068.048.999,00 dibandingkan dengan saldo tahun 2021 sebesar Rp2.700.802.941,00.

Terjadinya penambahan saldo peralatan dan mesin tersebut berasal dari:

a. Belanja modal, antara lain berupa :

- 1) Pengadaan alat rumah tangga lainnya (Home Use) berupa 1 (satu) unit smart TV sebesar Rp26.048.999,00.
- 2) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan 6 (enam) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) sebesar Rp 1.967.965.000,00;
- 3) Pengadaan Personal computer berupa 5 (lima) unit PC All In One dan 10 (sepuluh) unit laptop sebesar Rp203.514.000,00;
- 4) Pengadaan peralatan personal computer berupa 10 (sepuluh) unit printer sebesar Rp18.000.000,00.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1) Bangunan Gedung	765.294.006,00	765.294.006,00
2) Bangunan Monumen	-	-
3) Bangunan Eks SD 5 Procot		
Jumlah	765.294.006,00	765.294.006,00

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 sama dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.987.600,00.

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2022 sama dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.062.450,00, dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3
1) Buku	33.062.450,00	33.062.450,00
Barang Bercorak		
2) Kesenian/Kebudayaan	-	-
Hewan/Ternak dan		
3) Tumbuhan	-	-
Jumlah	33.062.450,00	33.062.450,00

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sama dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.680.000,00.

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 dengan saldo sebesar Rp 3.069.989.974,00.

f. Aset Lainnya**31 Desember 2022**
Rp3.069.989.974,00**31 Desember 2021**
Rp 2.710.370.972,00

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
Tidak ada Tagihan Piutang Penjualan Angsuran yang dikelola Inspektorat Kabupaten Tegal.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tidak ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dikelola Inspektorat Kabupaten Tegal
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Tidak ada Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dikelola Inspektorat Kabupaten Tegal
- 4) Aset Tidak Berwujud
Saldo Aset tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sama dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp106.667.550,00. Rincian Aset Tidak Berwujud yang dikelola Inspektorat yaitu :

NO.	URAIAN	HARGA PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	AMORTISASI TAHUN LALU	AMORTISASI TAHUN SEKARANG	AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Sistem Informasi Pengawasan	33.062.550,00	2006	-	-	33.062.550,00	-
2	Website Inspektorat Kabupaten Tegal	35.330.000,00	2015	27.233.541,79	8.096.458,21	27.233.541,79	
3	Sistem Informasi Pengawasan	38.275.000,00	2015	29.503.645,71	8.771.354,29	29.503.645,71	
JUMLAH		106.667.550,00		56.737.187,50	16.867.812,50	106.667.550,00	

5) Aset Lain – Lain

Tidak ada aset lain-lain yang dikelola Inspektorat Kabupaten Tegal

II. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2021 31 Desember 2022 Rp 9.000.611,00 Rp 9.806.023,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.806.023,00 mengalami kenaikan sebesar Rp805.412,00 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.000.611,00.

a. Utang Perhitungan Fisik per 31 Desember 2021 31 Desember 2022 Pihak Ketiga (PFK) Rp0,00 Rp0,00

Tidak ada Utang Perhitungan Fisik Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2022.

b. Bagian Lancar Utang per 31 Desember 2021 31 Desember 2022 Jangka Panjang Rp0,00 Rp0,00

Tidak ada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang TA 2022 merupakan reklasifikasi dari utang jangka panjang TA 2022 yang dikelola Inspektorat Kabupaten Tegal.

c. Utang Beban/ Belanja 31 Desember 2020 31 Desember 2022 Rp8.643.111,00 Rp9.498.023,00

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.498.023,00, mengalami kenaikan sebesar Rp854.912,00 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.643.111,00.

Uraian		31 Desember 2021(Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1		2	3
1)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	Rp 138.466,00	Rp 104.032
2)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	Rp 612.500,00	Rp 85.500
3)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	Rp 4.751.950,00	Rp 6.340.191
4)	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 3.140.195,00	Rp 2.922.300
5)	Utang Belanja Jasa Kantor- Paket/ Pengiriman	Rp -	Rp 46.000
Jumlah		Rp 8.643.111,00	Rp 9.498.023,00

d. Utang Jangka Pendek 31 Desember 2021 31 Desember 2022 Rp0,00 Rp0,00

Saldo Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

e. Kewajiban Jangka Panjang 31 Desember 2021 31 Desember 2022

Rp0,00

Rp0,00

Tidak ada Utang Jangka Panjang TA 2022 yang dikelola Inspektorat Kabupaten Tegal.

III. EKUITAS

Ekuitas Dana

31 Desember 2021
Rp1.131.587.554,00

31 Desember 2022
Rp 3.087.293.699,00

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Ekuitas TA 2022 sebesar Rp 3.087.293.699,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Sesuai kewenangan Inspektorat Kabupaten Tegal yaitu menyelenggarakan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah, maka pada Tahun Anggaran 2022 Inspektorat menyelenggarakan kegiatan di bidang Pengawasan antara lain :

- 6.1.1 Meningkatkan kompetensi *stakeholder* dengan cara membentuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Mitra Desa sebagai sarana pembinaan dan konsultasi bagi Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) dan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit;
- 6.1.2 Melaksanakan penyelenggaraan pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat serta pemenuhan tindaklanjut atas hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal;
- 6.1.3 Melaksanakan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pada organisasi perangkat daerah dengan melaksanakan sosialisasi.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Inspektorat Kabupaten Tegal pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tegal untuk tahun 2022.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan Independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2023

INSPEKTUR,

SAIDNO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NP.19720713 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

INSPEKTORAT

JL. A. YANI SLAWI NO.173 TELP. (0283) 491550 – FAX. (0283) 491308
SLAWI 52412

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan OPD Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Slawi, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

SAIDNO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720713 199311 1 001